

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari tiap-tiap tahapan tersebut adalah :

##### 1. Penyusunan Rencana

Pada tahap penyusunan rencana pembangunan, Pemerintah Daerah diwajibkan menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, dimulai dari tingkat Desa atau Kelurahan, dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga tingkat Provinsi. Di sisi lain, juga dilaksanakan forum khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakomodasi sektor perencanaan. Setiap tahapan Musrenbang tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi aktual maupun capaian pembangunan dari periode sebelumnya, sehingga perencanaan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

##### 2. Pelaksanaan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

Penyusunan rencana awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan keterkaitannya dengan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keberadaan rencana awal RKPD memiliki peranan strategis dalam menentukan keseluruhan proses perencanaan tahun daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menguraikan arah kebijakan dan program

pembangunan secara indikatif untuk tahun yang direncanakan.

### 3. Penentuan Prioritas Pembangunan

Proses penetapan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan wadah diskusi antar pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah strategi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Forum ini dikoordinasikan secara langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat

### 4. Evaluasi / pelaporan

Evaluasi merupakan proses penting yang dilakukan dengan menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan untuk periode pelaksanaan selanjutnya. Fungsi utama dari evaluasi ini adalah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan, yang mencakup penilaian terhadap kondisi awal sebelum pelaksanaan program dimulai, serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pada periode sebelumnya. Melalui hasil evaluasi tersebut, dapat diidentifikasi berbagai kekurangan maupun tantangan yang dihadapi.

## 5.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas pembangunan daerah, terdapat sejumlah saran yang dapat disampaikan sebagai masukan sekaligus evaluasi bagi pemerintah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kegiatan pembangunan dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk tahapan penyusunan yang melibatkan forum

Musrenbang.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan komunikasi untuk memberikan informasi mengenai pembangunan daerah.

Hasil akhir dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disusun sebagai sumber informasi yang penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan serta penyusunan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks ini juga berfungsi sebagai alat ukur terhadap kinerja pelayanan pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui evaluasi yang berbasis pada IKM, diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, serta mampu memberi kepuasan dan manfaat nyata.

